

PERSPEKTIF EKOLOGI POLITIK



Dr. Jumiati Lira, S.P., M.M.

Dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar

Jumiati.amin@unismuh.ac.id

Kajian ekologi politik sebelumnya merupakan hasil dari perkembangan dari ilmu pengetahuan ecology manusia, dan sosiologi lingkungan. Ekologi manusia untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Haeckel pada tahun 1866 sebagai ilmu yang memiliki konsep tentang hubungan manusia (*human system*) dengan alam (*non-human system*) di biosfer. Ekologi manusia melakukan pengkajian-pengkajian pada isu kehancuran alam dari perspektif konflik-social dan mengkaji lembaga fungsional dalam tata hubungan manusia dengan alam (Dunlap and Catton, 1979). Analisa ekologi-biologi maupun sosiologi untuk menjelaskan keterkaitan hubungan manusia dengan alam melalui pendekatan antropologi mulai berkembang sejak akhir dekade 1970-an dan awal 1980an. Meskipun demikian, istilah ekologi politik pertama kali dicetuskan oleh Russet (1967); Wolf (1972); Miller (1978); Cocburn dan Ridgeway (1970) (Robbins, 2004). Istilah ekologi sendiri sebenarnya merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antar manusia dan lingkungannya. Sebagai bidang ilmu pengetahuan, ekologi bertujuan untuk memberikan ilustrasi hubungan antar manusia dan spesies lainnya.

Ekologi politik merupakan kelanjutan dari kajian ekologi budaya (*cultural ecology*). Hal ini bisa dilihat dari kajian *cultural ecology* tahun 1960-an. Escobar (2006) berpendapat bahwa kerangka ekologi politik (*political ecology*) dapat diterapkan dari hubungan antara perbedaan dan kesamaan akses dalam konflik distribusi ekonomi, ekologi, dan budaya. Hal ini didukung oleh Turner (2004) yang mengatakan bahwa konflik sumber daya telah menjadi fokus analisis dan metodologi utama dari ekologi politik karena konflik dapat menjelaskan kepentingan, kekuatan, dan kerentanan yang

berbeda dari kelompok sosial yang berbeda yang didasari oleh keprihatinan terhadap keadilan sosial dalam pemanfaatannya.

Bryant dan Bailey (1997) menjelaskan bahwa ekologi politik menjadi bidang kajian yang mempelajari aspek-aspek sosial politik pengelolaan lingkungan, dengan asumsi pokok bahwa perubahan lingkungan tidak bersifat teknis, tetapi merupakan suatu bentuk politisasi lingkungan yang melibatkan aktor-aktor yang berkepentingan baik pada tingkat lokal, regional, maupun global. Blaikie *et al.*, (1987) mendefinisikan ekologi politik ini sebagai kombinasi perhatian dari ekologi dan ekonomi politik dalam arti luas yakni dialektika antara masyarakat dan sumber daya berbasis tanah dan termasuk juga dialektika antar kelas dan kelompok di dalam masyarakat itu sendiri (Walker, 2005). Menurut Walker (2005) ekologi politik merupakan kajian yang mendominasi dalam beberapa penelitian tentang hubungan manusia dan lingkungan dalam ilmu geografi. Akar pemikiran ekologi politik ini sudah dimulai sejak Steward (1955) mengkaji tentang strategi ekologi manusia menjadi adaptasi kebudayaan (ekologi budaya) dan juga dipengaruhi oleh pemikiran tentang bencana (*hazards*) (Burton, 1978).

Ekologi politik awal yang menekankan pada perubahan lingkungan biofisikal ini berkembang pula sebagai respon dari teori Malthusian (Shanin 1971) dan teori-teori Marxist (Frank, 1969 dan Wallerstein, 1974). Para ilmuwan mulai fokus pada ketidakseimbangan relasi kekuasaan, konflik, dan modernisasi kebudayaan ekonomi politik kapitalis. Fase ekologi politik strukturalis cirinya adalah seperti kajian Bunker (1984) yang menggunakan pendekatan sistem dunia (*marxist*) dan teori dependensi mencoba untuk menjelaskan teori sistem ekologi dari aliran energi dan barang-barang dari negara pinggiran ke negara maju. Hal ini juga ditekankan oleh kajian-kajian Blaikie yang sampai pada kesimpulan bahwasanya ekologi politik tidak hanya menghubungkan antara politik dan pengetahuan lingkungan saja, dan yang lebih penting adalah mengkaitkannya dengan masalah-masalah kerentanan manusia secara sosial (epistemologi keadilan sosial) (Forsyth, 2003). Sedangkan pada tahun 1990an, ekologi politik mulai sedikit bergeser perhatiannya tidak lagi berpusat pada peran ekonomi politik yang dianggap terlalu makro deterministik. Sehingga muncul kajian baru yang lebih bersifat studi-studi lokal gerakan lingkungan, diskursus dan politik simbolik (mikro politik), serta hubungan kelembagaan dan kekuasaan,

pengetahuan dan praktis dari perjuangan di lapangan. Sebuah aliran yang disebut sebagai ekologi politik poststrukturalis.

Beberapa isu kunci dalam ekologi politik merupakan wilayah eksplorasi yang memiliki hubungan multilevel antara fenomena global dan lokal. Tidak hanya soal fungsi lingkungan tetapi juga soal pengambilan keputusan dan hierarki kekuasaan. Ada empat isu utama yang kemudian menjadi dominan dalam kajian ekologi politik global saat ini, yaitu *deforestation*, *desertification*, *biodiversity utilization* dan *climate change* (Adger *et al.*, 2000). Isu tersebut merupakan diskursus yang menjadi perdebatan utama dalam lapangan pembangunan dan lingkungan dalam berbagai skalanya.

Terdapat beberapa pendekatan yang berbeda didalam ekologi politik yang saling melengkapi, ragam pendekatan tersebut muncul dari hasil riset berbagai ahli. Berdasarkan hasil riset tersebut, Bryant dan Bailey (2001) memetakannya menjadi lima pendekatan yang terkait satu sama lainnya.

1. Pendekatan yang bertumpu pada masalah lingkungan secara spesifik, dan pijakannya adalah perspektif atau bidang kajian traditional geography serta berkaitan dengan upaya memahami dampak manusia terhadap lingkungan fisik.
2. Pendekatan yang bertumpu pada konsep terkait dengan pertanyaan ekologi politik, yakni mengeksplorasi bagaimana konsep – konsep tersebut dikonstruksi. Analisis wacana yang mendominasi sekitar konsep pembangunan berkelanjutan dalam rangka memperjelas asumsi dasar tentang masyarakat dan alam serta ekonomi politik yang membuat asumsi itu ada.
3. Pendekatan yang melihat kaitan politik dengan masalah ekologis dalam konteks wilayah geografis tertentu, seperti kajian masalah lingkungan di Asia, Afrika dan sebagainya.
4. Pendekatan yang mengeksplorasi pertanyaan ekologi politik terkait dengan karaktersitik sosial ekonomi, seperti kelas, gender, dan etnik.
5. Pendekatan yang menekankan kebutuhan untuk fokus pada kepentingan, karakteristik, dan tindakan dari para aktor dalam memahami konflik politik dan ekologi.

Bryant dan Bailey (1997) menjelaskan bahwa politik ekologi menggunakan asumsi untuk menafsirkan politisasi lingkungan dunia ketiga dan memfokuskannya pada deskripsi dari perubahan lingkungan fisik sendiri, tetapi pada cara

bagaimana perubahan tersebut berhubungan dengan aktivitas manusia. Asumsi tersebut adalah; 1) peneliti politik ekologi menerima gagasan bahwa biaya dan manfaat yang terkait dengan perubahan lingkungan sebagian besar didistribusikan diantara aktor secara tidak merata, 2) distribusi yang tidak merata dari biaya dan manfaat lingkungan tersebut memperkuat atau mengurangi senjangan sosial dan ekonomi yang ada, dan 3) dampak sosial dan ekonomi yang berbeda dari perubahan lingkungan juga memiliki implikasi politik dari segi perubahan kekuasaan aktor-aktor dalam hubungannya dengan aktor-aktor lainnya. Politisasi lingkungan yang terjadi di dunia ketiga mencakup tiga dimensi, yaitu: hari-hari, episodik, dan sistemik. Dimensi ini berkaitan dengan perubahan fisik, gkat dampak, sifat dampak terhadap manusia, respon politik, dan konsep-konsep kunci seperti yang tertera pada Tabel 2.

Tabel 1. Dimensi Politisasi Lingkungan

Dimensi	Perubahan fisik	Tingkat dampak	Sifat dampak terhadap manusia	Respon politik	Konsep kunci
Sehari-hari	Erosi tanah, deforestasi, salinisasi	Bertahap dan bahkan mungkin tidak dirasakan untuk waktu yang lama	Kumulatif dan biasanya sangat tidak setara; orang miskin yang paling menderita (terjadi ketidakadilan/ketidakmerataan dalam memperoleh Sumber daya)	Resistensi/ protes masyarakat terkena dampak yang dilakukan oleh mereka yang terancam kelangsungan nafkahnya serta merasa tertekan oleh kehancuran lingkungan	Marjinalisasi (proses peminggiran kaum miskin dan ketidakadilan lingkungan yang diderita oleh alam
Episodik (berjalan/berlanjut)	Banjir, badai, kekeringan	Sering tapi kadang-kadang muncul secara tiba-tiba	Bisa banyak kemungkinan akan tetapi orang miskin adalah yang paling menderita dan alam	Bantuan "bencana" perbaikan sumber daya dan lingkungan	Kerentanan (terjadi kerawanan pangan dan ketidakpastian nafkah serta kehancuran alam
Sistemik (keseluruhan dari segalanya)	Radiasi nuklir, konsentrasi pestisida, spesies termodifikasi secara biologi	Bertahap dan belum tentu dirasakan tetapi juga berpotensi secara mendadak	Cenderung mempunyai dampak umum karena manusia dan alam akan menjadi menderita	Ketidakpercayaan terhadap pakar/ahli	Resiko (struktur alam dan masyarakat kehidupannya sangat berisiko terhadap kehancuran dan kematian

Sumber: Bryant dan Bailey (1997)

Tabel 1 memperlihatkan adanya gambaran tentang bentuk-bentuk serta derajat kehancuran alam dan masyarakat dengan berlangsungnya krisis ekologi. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh gambaran untuk dijadikan informasi dalam merumuskan

strategi dan aplikasi terhadap kebijakan lingkungan sebagai bentuk intervensi aksi dan pengaruh politik. Menurut Bryant dan Bailey (1997) sistem sosial masyarakat akan menghadapi tiga aspek penting atas kerusakan lingkungan di lihat dari perspektif ekonomi politik, ketiga aspek itu adalah: 1) marjinalitas atau peminggiran secara sosial ekologi sebuah kelompok makhluk hidup, 2) kerentanan secara sosial, ekonomi, ekologi dan fisikal akibat berlangsungnya kehancuran secara terus menerus dan 3) kehidupan yang penuh dengan resiko kehancuran taraf lanjut. Selanjutnya Bryant dan Bailey (1997) menjelaskan pentingnya ekologi politik, karena masyarakat dunia memiliki tiga pilihan atas kehancuran alam yang tak dapat terelakkan dan menjadi suatu realitas (*the inconvenient truth*). Robbins (2004) mendukung pendapat Bryant dan Bailey (1997) yang melihat permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh dunia ketiga bukan merupakan refleksi dari kegagalan kebijakan pasar, tetapi merupakan manifestasi dari kekuatan politik dan ekonomi yang lebih luas yang terkait dengan penyebaran kapitalisme, terutama sejak abad ke-19 (penebangan hutan, pertambangan, industrialisasi, urbanisasi, dan lain-lain). Adanya campur tangan negara dalam aktivitas perekonomian mendorong ke arah kehancuran lingkungan. Kompleksnya permasalahan lingkungan dunia ketiga membutuhkan tidak sekedar kebijakan yang bersifat teknis, melainkan juga perubahan mendasar dalam proses politik ekonomi di tingkat lokal, regional, dan global. Bryant (1992) mengatakan bahwa peneliti ekologi politik mempunyai premis bahwa perubahan lingkungan bukanlah proses manajemen teknis, sebaliknya perubahan lingkungan tersebut memiliki sumber politik, kondisi dan konsekuensi yang berbenturan dengan kesenjangan sosial ekonomi serta proses politik yang berlangsung. Reduksionisme ekonomi harus dihindari ketika menggunakan interpretasi ini, karena reduksionisme tersebut menyederhanakan realitas dan mengurangi akurasi dari analisis yang dapat melemahkan penelitian ekologi politik dunia ketiga dalam tiga cara, yaitu: (1) reduksionisme ekonomi gagal mengaitkan makna yang menjelaskan faktor ekologi, (2) reduksionisme ekonomi mengabaikan sumber-sumber lain perubahan lingkungan, dan (3) reduksionisme ekonomi juga tidak mempertimbangkan secara serius kekuatan petani dan kelompok-kelompok lainnya yang kurang beruntung secara sosial. Ekologi politik dunia ketiga harus dipahami secara inklusif yang didasarkan pada pandangan bahwa ekologi politik dunia ketiga tersebut harus peka terhadap interaksi beragam kekuatan sosial politik dan relasi kekuatan ini terhadap perubahan lingkungan. Sejalan

dengan pandangan tersebut, De Koning (2008) berpendapat bahwa penekanan yang diberikan oleh ekologi politik adalah hubungan antara akses sumber daya alam dan alokasi, distribusi kekuasaan dalam mediasi akses, dan alokasi serta lembaga yang memegang kekuasaan. Oleh karena itu, Schubert (2005) mengatakan bahwa fokus peneliti ekologi politik adalah pada struktur dan konstruksi sosial yang membentuk akses dan kontrol atas sumber daya alam tersebut dan tidak hanya pada konflik kekerasan saja karena mereka cenderung melihat konflik dan konflik kepentingan melekat pada hubungan sosial serta interaksi manusia dengan alam.

Sejalan dengan pernyataan Bryant dan Bailey (1997); Stott dan Sullivan (2000) mengatakan bahwa bidang ekologi politik sangat beragam sehubungan dengan substantif, epistemologi fokus, dan metode. Selanjutnya penelitian ekologi politik yang beragam di banyak lokasi, oleh Robbins (2004) dibagi ke dalam empat pertanyaan besar, tema, atau narasi penelitian seperti yang tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Tesis Ekologi Politik

Tesis	Apa yang dijelaskan	Relevansi
Degradasi dan marjinalisasi	Perubahan lingkungan: mengapa dan bagaimana?	Degradasi lahan, menyalahkan masyarakat marjinal, diletakkan dalam
Konflik lingkungan	Akses lingkungan: konteks politik dan ekonomi yang lebih luas	Konflik lingkungan ditunjukkan menjadi bagian yang lebih luas dari perjuangan gender, kelas, ras, dan sebaliknya
Konservasi dan kontrol	Kegagalan konservasi dan pengecualian politik/ekonomi: mengapa dan bagaimana?	Biasanya dipandang tidak ramah, usaha-usaha konservasi lingkungan ditunjukkan memiliki dampak buruk dan kadang-kadang gagal hasilnya
Identitas lingkungan dan pergerakan sosial	Pergolakan sosial: siapa, dimana, dan bagaimana?	Perjuangan politik dan sosial ditunjukkan dikaitkan dengan isu-isu perlindungan mata pencaharian dan lingkungan
Objek Politik dan aktor	Sosial- kondisi politik yang sangat terstruktur)	sistem politik dan ekonomi dan yang dipengaruhi oleh aktor-aktor yang bukan manusia yang terjalin diantara mereka

Sumber: Robbins (2004)

Robbins (2004) mengemukakan lima tesis dalam pendekatan ekologi politik yaitu: 1) konsep degradasi dan marjinalisasi, 2) konflik lingkungan, 3) konservasi dan kontrol, 4) Identitas lingkungan dan pergerakan sosial, dan 5) objek politik dan aktor. Sedangkan Bryant dan Bailey (1997) mengatakan bahwa peneliti ekologi politik

memberikan suatu perspektif politik ekonomi secara luas dengan mengadopsi berbagai pendekatan dalam menerapkan perspektif tersebut untuk investigasi interaksi manusia-lingkungan di dunia ketiga. Pendekatan yang berbeda tersebut tidak saling eksklusif karena para peneliti sering menggabungkan atau menggunakan pendekatan yang berbeda. Hal ini mencerminkan prioritas penelitian yang berbeda di lapangan, yaitu: 1) pendekatan yang mengarahkan penelitian dan penjelasan dalam ekologi politik dunia ketiga seputar masalah lingkungan tertentu atau serangkaian masalah seperti erosi tanah, deforestasi hutan tropis, pencemaran air, atau degradasi lahan, 2) pendekatan yang memfokuskan pada suatu konsep yang dianggap memiliki kaitan penting terhadap pertanyaan ekologi politik, 3) pendekatan yang memeriksa hubungan masalah - masalah politik dan ekologi dalam konteks suatu wilayah geografis tertentu, 4) pendekatan yang mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan ekologi politik dalam menjelaskan karakteristik sosial ekonomi seperti kelas, etnis, atau gender, dan 5) pendekatan yang menekankan kebutuhan yang terfokus pada kepentingan, karakteristik, dan tindakan dari berbagai tipe aktor dalam pemahaman konflik ekologi politik. Perhatian pendekatannya yaitu: 1) interaksi alam (lingkungan) dengan manusia, 2) analisa aktor lokal (*stakeholder*) yang terlibat dalam persoalan lingkungan, 3) analisa bagaimana interaksi, dari tingkat lokal sampai global, aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik dari suatu lingkungan, 4) analisa bagaimana tindakan masa lalu menentukan dan menciptakan berbagai ketidakadilan (*inequalities*) yang masih ada sekarang Walker (1998); Biersack and Greenberg (2006), 5) relasi gender, 6) analisa bagaimana kekuasaan (*power*) dan bangunan pengetahuan (*knowledge*) mempengaruhi lingkungan (Foucault), dan 7) analisa hubungan manusia dengan lingkungan sebagai '*socially constructed*'.